

MODERNISASI KOPERASI INDONESIA

Heri Nugraha

(Institut Manajemen Koperasi Indonesia/herinugraha@ikopin.ac.id)

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) di Indonesia telah menghadirkan berbagai inovasi dalam berusaha. Bonus demografi serta infrastruktur teknologi informasi yang masif telah melahirkan *start-up* dengan aneka layanan berbasis *smartphone*. *Start-up* adalah model bisnis baru yang saat ini sangat diminati oleh *millenials*. Indonesia saat ini memiliki hampir 1.000 *start-up* dan berdasarkan hasil *Polling Study* Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet mencapai 171,17 juta orang. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi gerakan koperasi di Indonesia untuk berinovasi dengan asumsi bahwa nilai-nilai koperasi seperti pengelolaan yang demokratis, kesetaraan dan keadilan sangat selaras dengan koperasi namun permasalahannya adalah bagaimana memodernisasi koperasi agar dapat menangkap peluang ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan studi pustaka dan aspek legal, *Focus Group Discussion* dan pengamatan langsung kepada objek penelitian kemudian melakukan verifikasi terhadap keberlakuan sebuah konsep atau teori yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilar Kelembagaan Koperasi masih menggunakan cara-cara tradisional, dari tiga indikator yang dianalisis semua menunjukkan bahwa untuk pilar ini belum terjadi modernisasi, Pilar Usaha Koperasi sudah menunjukkan penggunaan cara-cara modern, hal ini terlihat dari beberapa indikator yang dianalisis menunjukkan telah terjadi modernisasi terutama pada indikator telah memiliki *off taker* dan memanfaatkan teknologi informasi, Pilar Keuangan Koperasi merupakan pilar yang secara dominan terlihat telah terjadi modernisasi, hal ini sejalan dengan gencarnya program-program pemerintah untuk penguatan di Pilar Keuangan melalui Bimtek yang secara masif rutin dilakukan.

Kata Kunci : *Koperasi, Modernisasi, Kelembagaan, Usaha, Keuangan*

Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang terjadi di Indonesia sejak Tahun 2019 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik pada Triwulan I Tahun 2021 mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan sehingga hanya tumbuh berkisar -0,74%, hal ini sebagai konsekuensi dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di Tahun 2020 yang dilanjutkan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun kondisi yang memberi angin segar terjadi pada Triwulan III di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh +3,51%, hal ini menumbuhkan semangat optimis bagi Pemerintah untuk melanjutkan kebijakan PPKM dengan tetap menumbuhkan ekonomi, *killing the virus not the economy* pada Tahun 2022.

Kebijakan PPKM dengan membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat dengan *stay at home* dan *work from home* memaksa masyarakat untuk memanfaatkan *Information and Communications Technology* (ICT) yang memang saat ini dunia sedang mencapai titik tertinggi dari perkembangan

teknologi tersebut. Saat ini dunia sudah berada pada era industri 4.0 yang akan bergeser ke industri 5.0 akibat desakan dari semakin tumbuhnya *community 5.0* di Jepang, di mana ada saat industri 5.0 perkembangan *Artificial Intelligence* akan terjadi secara masif dipergunakan untuk melayani segala kebutuhan masyarakat. Selain itu dampak dari perkembangan ICT dan AI tersebut mendorong lahirnya *Collaborative/Sharing Economy*.

Seiring dengan perkembangan tersebut, Koperasi di Indonesia menunjukkan beberapa indikator yang mulai membaik pada masa sebelum pandemi *Covid-19*, yaitu antara Tahun 2016 s/d 2019, hal ini ditunjukkan oleh membaiknya kinerja Koperasi di Indonesia seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Perkembangan Kinerja Koperasi di Indonesia

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	151.170	152.174	126.343	123.048
2	Jumlah Anggota (Orang)	11.842.415	18.228.682	20.049.995	22.463.738
3	Jumlah Sertifikasi NIK	7.185	20.136	30.188	35.761
4	Jumlah Modal Sendiri (Rp. Triliun)	26,25	66,93	74,90	70,92
5	Jumlah Modal Luar (Rp. Triliun)	28,23	61,76	66,22	81,190
6	Jumlah Aset (Rp. Triliun)	54,48	128,70	141,13	152,113
7	Jumlah Volume Usaha (Rp. Triliun)	67,50	137,26	145,86	154,718
8	Jumlah PDB Koperasi (%)	3,99	4,48	5,10	5,54

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2019

“Reformasi Total Koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional dari 3,99% pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,1% pada tahun 2018. Peningkatan kontribusi PDB Koperasi tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2016 sebesar Rp67,50 triliun, naik 103% pada tahun 2017 menjadi Rp137,26 triliun, pada tahun 2018 naik 6,3% menjadi Rp145,86 triliun dan pada tahun 2019 naik 5,7% menjadi Rp154,14 triliun yang menggambarkan bahwa kontribusi koperasi dalam perekonomian juga mengalami peningkatan. Dilihat dari perspektif skala nasional, maka peningkatan volume usaha tersebut dapat dijelaskan bahwa yang masuk dalam modal sendiri sebesar Rp26,25 triliun pada tahun 2016, Rp66,93 triliun pada tahun 2017, Rp74,90 triliun pada tahun 2018 dan Rp.70,92 triliun pada tahun 2019, sedangkan modal luar secara nasional sebesar Rp28,23 triliun pada tahun 2016, Rp61,76 triliun pada tahun 2017, Rp66,22 triliun pada tahun 2018 dan Rp81,190 triliun pada tahun 2019. Aset yang dimiliki secara nasional pada tahun 2016 sebesar Rp 54,48 triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp128,70 triliun, pada tahun 2018 sebesar Rp141,13 triliun dan pada tahun 2019 Rp152,113 triliun, jika dilihat dari sudut pandang anggota, maka jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan rata-rata 37,98% dari sejumlah 11.842.415 orang pada tahun 2016 menjadi 22.463.738 orang pada tahun 2019.”

Seperti telah disebutkan di atas tentang era *sharing economy* atau *collaborative economy*. Istilah-istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk pada penggunaan *platform digital* dalam mengolaborasi beragam kelompok dari berbagai sektor dengan bermacam-macam sumber daya untuk saling bertukar, berbagi, atau bersinergi dalam berbagai cara. *Platform* ekonomi kolaboratif baru terus diluncurkan oleh perusahaan, organisasi nirlaba, kelompok informal, dan beroperasi secara lokal, nasional, atau bahkan global. Gagasan yang mendasari *collaborative economy* adalah bahwa banyak sumber daya yang ada masih kurang dimanfaatkan oleh pemiliknya, padahal sumber daya itu bisa memiliki nilai lebih tinggi jika dibagikan atau dipertukarkan dengan pihak lain yang mungkin

lebih membutuhkannya.

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) di Indonesia juga telah menghadirkan berbagai inovasi dalam berusaha. Bonus demografi serta infrastruktur teknologi informasi yang masif telah melahirkan *start-up* dengan aneka layanan berbasis *smartphone*. *Start-up* adalah model bisnis baru yang saat ini sangat diminati oleh para *millenials*. Indonesia saat ini memiliki hampir 1.000 *start-up* dan berdasarkan hasil *Polling Study* Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet mencapai 171,17 juta orang. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi gerakan koperasi di Indonesia untuk berinovasi dengan asumsi bahwa nilai-nilai koperasi seperti pengelolaan yang demokratis, kesetaraan dan keadilan sangat selaras dengan gaya hidup *millenials*. Nilai-nilai koperasi seperti demokrasi, kesetaraan, keadilan dan lainnya dapat selaras dalam menjawab keadaan perseroan dimana pemilik modal berkuasa penuh. Komunitas kreatif yang tumbuh di era ekonomi kreatif akan merasa tepat berada dalam model koperasi daripada perseroan karena koperasi lebih mengafirmasi dan mengamplifikasi nilai sosial-budaya suatu komunitas. Hal ini akan menjadi energi baru yang dibutuhkan untuk melakukan regenerasi di masa bonus demografi, sehingga memberikan optimisme terhadap model ini untuk dapat berkembang terus dan tidak hanya bersifat sementara,' sehingga artikel ini akan membahas tentang Modernisasi Koperasi Indonesia.

Dari uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana modernisasi Koperasi di Indonesia. Kajian ini dimaksud untuk memberi gambaran tentang modernisasi Koperasi Indonesia dan bertujuan untuk mendapatkan sebuah model Koperasi hasil dari modernisasi, yang kemudian akan diistilahkan sebagai Model Koperasi Modern

Tinjauan Pustaka

Alfred Hanel (2005) mengemukakan bahwa ada dua pendekatan dalam mendefinisikan koperasi, kedua pendekatan tersebut adalah, pendekatan *esensialis* (pengertian koperasi menurut hukum) dan pendekatan *nominalis* (pengertian koperasi menurut ekonomi). Pendekatan esensial adalah suatu pendekatan dalam mendefinisikan koperasi dengan berfokus pada prinsip-prinsip koperasi, terutama prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan oleh para pelopor koperasi. Pengertian atau definisi koperasi menurut pendekatan esensial (pengertian koperasi menurut hukum) seperti menurut Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 1 Ayat (1) sampai Ayat (5) berbunyi :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

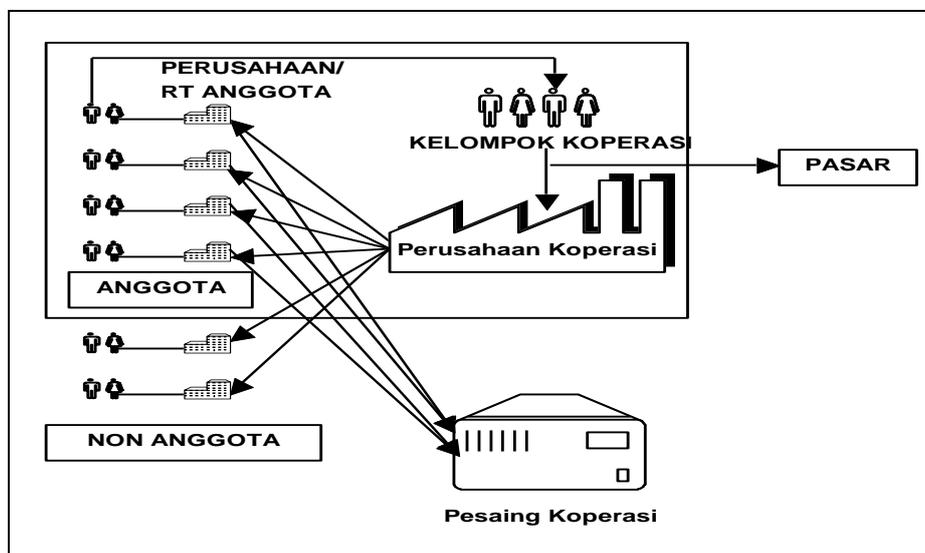
Koperasi sebagai badan usaha (organisasi ekonomi) tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip –prinsip ekonomi yang berlaku dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar koperasi, yang beranggotakan orang-seorang; dapat dikatakan sebagai koperasi primer, atau badan hukum koperasi; dapat dikatakan sebagai koperasi sekunder, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat; koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya, yang berdasar atas asas kekeluargaan; koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong-royong, sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi untuk mencapai kepentingan bersama.

Sedangkan pendekatan nominalis sesuai dengan pendekatan ilmiah modern dalam ilmu ekonomi koperasi, yang dijelaskan sebagai berikut:

Koperasi adalah lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang (tanpa memperhatikan bentuk hukum atau wujudnya) memenuhi kriteria:

- a) Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar -sekurang kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (Kelompok Koperasi);
- b) Anggota-anggota kelompok koperasi secara individual bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha – usaha bersama dan saling membantu (Swadaya dari Kelompok Koperasi);
- c) Sebagai instrumen (wahana) untuk mewujudkannya suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama (Perusahaan Koperasi);
- d) Perusahaan koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu, dengan cara menyediakan/menawarkan barang dan jasa yang di butuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan/usaha dan/atau rumah tangganya masing-masing (Tujuan/Tugas atau Prinsip Promosi Anggota).

Uraian tersebut dapat divisualisasikan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1.
Koperasi Sebagai Sebuah Sistem Sosio-Ekonomi

Selain itu koperasi harus menjalankan prinsip-prinsip koperasi yang sesuai dengan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang terdiri dari:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e) Kemandirian.
- f) Pendidikan perkoperasian
- g) Kerjasama antar koperasi

Juga harus merujuk pada nilai-nilai koperasi yang terdiri dari :

- a) *Self-help* (Menolong diri sendiri), artinya motif kerjasama antar orang dalam wadah koperasi adalah menggalang potensi guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama.
- b) *Self-responsibility* (Tanggung Jawab), adalah segala kegiatan usaha koperasi yang harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab koperasi.
- c) *Democracy* (Demokrasi), yaitu merupakan cita-cita yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi sebagai konsekuensi koperasi sebagai organisasi ekonomi yang menghimpun orang yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Artinya bahwa setiap anggota koperasi benar-benar diorbankan dengan cara dilibatkan secara aktif untuk menentukan haluan dan sekaligus mengendalikan jalannya koperasi.
- d) *Solidarity* (Solidaritas), yaitu koperasi perlu mempunyai rasa memiliki dalam bekerjasama. Dengan solidaritas maka rasa kesetiakawanan akan dirasakan oleh anggota, dan anggota akan mempunyai rasa kesamaan dalam mempertahankan taraf hidup yang lebih baik.
- e) *Equity* (Keadilan), merupakan unsur sosial psikologi yang harus diperhatikan dalam koperasi. Hal ini berkaitan dengan pembagian SHU koperasi yang harus dibagikan secara adil kepada setiap anggota.
- f) *Equality* (Persamaan), adalah yang berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Semua anggota mempunyai kedudukan yang sama dan hak suara yang sama yaitu satu orang satu suara (*one man one vote*).

Secara organisasi koperasi di Indonesia mempunyai tiga perangkat kelengkapan Organisasi Koperasi yaitu :

- a) Rapat Anggota
- b) Pengurus
- c) Pengawas

Pengertian modernisasi koperasi “Modernisasi koperasi adalah sebuah proses Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju koperasi yang lebih maju (modern) atau masa kini.”¹

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode deskriptif, dengan studi pustaka dan aspek legal, *Focus Group Discussion* dan pengamatan langsung kepada objek penelitian kemudian melakukan pembentukan model dengan mengikuti langkah-langkah membuat model.

¹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5847542/apa-itu-modernisasi-yuk-kenali-pengertian-ciri-ciri-dan-dampaknya>, 18 januari 2022

Pada tahap studi awal dicari terlebih dahulu pengertian Koperasi Modern menurut regulator dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang memberi pengertian bahwa Koperasi Modern adalah:

“Koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan manajemen tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*), memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan.”²

Merujuk pada pengertian tersebut kemudian mengelompokkan koperasi ke dalam tiga (3) pilar, yaitu: Pilar Kelembagaan, Pilar Usaha dan Pilar Keuangan.

Selanjutnya dengan pendekatan pemodelan sistem dilakukan analisis yang mendalam terhadap tiga (3) pilar koperasi tersebut sampai diperoleh suatu model koperasi modern.

Objek pada penelitian ini adalah Koperasi di Indonesia yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian serta sesuai dengan karakteristik Koperasi menurut ICA, di mana jumlah koperasi sebagai objek terdiri dari 30 koperasi yang ada di Pulau Jawa dengan komposisi:

PROVINSI	JUMLAH
Banten	6
Jawa Barat	6
Jawa Tengah	6
Daerah Istimewa Yogyakarta	6
Jawa Timur	6
Jumlah	30

Dari seluruh Provinsi yang ada di Pulau Jawa Provinsi DKI Jakarta tidak dipilih karena kondisi koperasi di provinsi tersebut relatif berbeda dengan di 5 Provinsi terpilih.

Hasil dan Pembahasan

a. Kondisi Perkoperasian Indonesia Saat Ini

Menjawab rumusan masalah nomor 1 diuraikan tentang kondisi Perkoperasian di Indonesia saat ini dari beberapa pilar, yaitu Pilar Kelembagaan, Pilar Usaha dan Pilar Keuangan.

Pilar Kelembagaan Koperasi

Pilar Kelembagaan Koperasi terdiri dari indikator-indikator Daftar Keanggotaan, Manajemen dan Rapat Anggota Tahunan.

Dari hasil pengamatan terhadap indikator-indikator Pilar Kelembagaan Koperasi didapat hasil seperti pada Tabel 2:

² Kemenkop dan UKM 2019

Tabel 2.
Daftar Indikator Pilar Kelembagaan

No.	NAMA KOPERASI	DAFTAR ANGGOTA			RAT			KEUANGAN		
		T	SM	M	T	SM	M	T	SM	M
1	Koperasi Arta Prima-Banten	X			X			X		
2	Koperasi Cipta Jaya Abadi-Banten	X			X			X		
3	Koperasi Tagana Mandiri Sejahtera-Banten	X						X		
4	Koperasi konsumen mandala sejahtera-Banten	X			X			X		
5	Koperasi sehat sejahtera-Banten	X			X			X		
6	Koperasi Serba Usaha Sepakat-Banten	X			X			X		
7	Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara		X			X			X	
8	Koperasi Peternak Bandung Selatan		X			X			X	
9	KSU Tandang Sari	X			X			X		
10	Koperasi Samitra Garut	X			X			X		
11	Koperasi Konsumen Peternak Mekar Jaya Garut	X			X			X		
12	Koperasi Swadaya Mandiri Tasikmalaya		X		X			X		
13	Koperasi Pedagang Susu Segar Assalaam-Surakarta	X			X			X		
14	Koperasi Produsen Sumber Agung Trajan-Surakarta	X			X			X		
15	KSU Mandiri Sukses-Sukoharjo	X			X			X		
16	Koperasi Rasita Berkah Mulia-Semarang		X		X			X		
17	Koperasi Berkah Utama-Semarang	X			X			X		
18	Koperasi Sentosa Makmur-Semarang	X			X			X		
19	Koperasi BTM Kota Gede-Jogjakarta	X			X			X		
20	Koperasi Karya Bakti-Jogjakarta		X		X			X		
21	Koperasi Gunung Ketur-Jogjakarta	X			X			X		
22	Koperasi Agung Mentari-Jogjakarta	X			X			X		
23	KUD Surejo-Jogjakarta	X			X			X		
24	KSU Melati-Jogjakarta	X			X			X		
25	KSU Dana Mandiri-Sidoarjo		X		X			X		
26	Koperasi Bina Sejahtera-Pacitan	X			X			X		
27	KUD Karya Sejahtera-Pacitan	X			X			X		
28	Kopwan Margo Mulyo-surabaya	X			X			X		
29	Koperasi Pertanian Ngudi Luhur-Pacitan	X			X			X		
30	KSU Sari Kencana-Pacitan	X			X			X		
TOTAL		24	6		28	2		28	2	
%		80	20		93	7		93	7	

Keterangan :

- T = Tradisional
- SM = Semi Modern
- M = Modern

Dari tabel di atas, koperasi-koperasi masih menggunakan cara-cara tradisional terlihat bahwa untuk indikator “Daftar Anggota” sebesar 80% masih menggunakan cara-cara tradisional, indikator

“RAT” sebesar 93% masih menggunakan cara-cara tradisional dan indikator “Keuangan” sebesar 93% masih menggunakan cara-cara tradisional. Dari keseluruhan maka untuk Pilar Kelembagaan masih menggunakan cara-cara Tradisional. Keuangan sebesar 93% masih menggunakan cara-cara tradisional. Dari keseluruhan maka untuk Pilar Kelembagaan masih menggunakan cara-cara Tradisional. Keuangan sebesar 93% masih menggunakan cara-cara tradisional. Dari keseluruhan maka untuk Pilar “Kelembagaan” koperasi masih menggunakan cara-cara Tradisional, hal ini dikhawatirkan menyebabkan pelayanan pada anggota tidak optimal.

a. Pilar Usaha Koperasi

Pilar Usaha Koperasi terdiri dari indikator-indikator, *Value/Supply Chain*, Memiliki *off taker*, Promosi anggota dan Memanfaatkan teknologi informasi. Dari hasil pengamatan terhadap indikator-indikator Pilar Usaha Koperasi didapat hasil seperti pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3.
Daftar Indikator Pilar Usaha Koperasi

No.	NAMA KOPERASI	Value/Supply Chain			Memiliki <i>off taker</i>			Promosi Anggota			Memanfaatkan Teknologi Informasi		
		T	SM	M	T	SM	M	T	SM	M	T	SM	M
1	Koperasi Arta Prima-Banten	X				X		X				X	
2	Koperasi Cipta Jaya Abadi-Banten	X			X				X		X		
3	Koperasi Tagana Mandiri Sejahtera-Banten	X			X			X			X		
4	Koperasi konsumen mandala sejahtera-Banten		X			X			X		X		
5	Koperasi sehat sejahtera-Banten	X				X			X		X		
6	Koperasi Serba Usaha Sepakat-Banten	X			X			X			X		
7	Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara			X			X			X			X
8	Koperasi Peternak Bandung Selatan			X			X			X			X
9	KSU Tandang Sari		X			X			X			X	
10	Koperasi Samitra Garut	X			X			X			X		
11	Koperasi Konsumen Peternak Mekar Jaya Garut		X			X		X				X	
12	Koperasi Swadaya Mandiri Tasikmalaya	X			X			X			X		
13	Koperasi Pedagang Susu Segar Assalaam-Surakarta		X			X			X			X	
14	Koperasi Produsen Sumber Agung Trajan-Surakarta		X			X			X			X	
15	KSU Mandiri Sukses-Sukoharjo	X			X			X				X	
16	Koperasi Rasita Berkah Mulia-Semarang	X			X			X			X		
17	Koperasi Berkah Utama-Semarang	X			X			X			X		
18	Koperasi Sentosa Makmur-Semarang	X			X			X			X		
19	Koperasi BTM Kota Gede-Jogjakarta	X			X			X			X		

20	Koperasi Karya Bakti-Jogjakarta	X			X			X			X		
21	Koperasi Gunung Ketur-Jogjakarta	X			X			X			X		
22	Koperasi Agung Mentari-Jogjakarta		X		X			X				X	
23	KUD Surejo-Jogjakarta		X				X	X			X		
24	KSU Melati-Jogjakarta	X			X			X			X		
25	KSU Dana Mandiri-Sidoarjo	X			X			X			X		
26	Koperasi Bina Sejahtera-Pacitan	X			X			X			X		
27	KUD Karya Sejahtera-Pacitan	X			X			X			X		
28	Kopwan Margo Mulyo-Surabaya	X			X			X			X		
29	Koperasi Pertanian Ngudi Luhur-Pacitan		X			X		X				X	
30	KSU Sari Kencana-Pacitan	X			X			X				X	
TOTAL		20	8	2	19	8	3	22	6	2	19	9	2
%		66	27	7	63	27	10	73	20	7	63	30	7

Keterangan :

T = Tradisional

SM = Semi Modern

M = Modern

Dari tabel di atas koperasi-koperasi masih menggunakan cara-cara tradisional terlihat bahwa untuk indikator “*Value/Supply chain*” sebanyak 66% koperasi masih menggunakan cara-cara tradisional, 27% menggunakan cara semi modern dan sisanya 7% menggunakan cara modern, sehingga untuk indikator ini sudah mulai beberapa koperasi melakukan modernisasi walaupun dalam jumlah yang masih sedikit dan itupun dilakukan oleh koperasi-koperasi yang berada dekat dengan apa

Untuk indikator “*Memiliki off taker*” sebanyak 63% koperasi masih menggunakan cara-cara tradisional, 27% menggunakan cara semi modern dan sisanya sebanyak 10% sudah menggunakan cara modern, hal ini mengindikasikan bahwa beberapa koperasi sudah melakukan modernisasi.

Untuk indikator “*Promosi Anggota*” sebanyak 73% koperasi masih menggunakan cara-cara tradisional, 20% menggunakan cara semi modern dan sisanya sebanyak 7% sudah menggunakan cara modern, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa koperasi yang sudah melakukan modernisasi.

Untuk indikator “*Memanfaatkan Teknologi Informasi*” sebanyak 63% koperasi masih menggunakan cara-cara tradisional, 30% menggunakan cara semi modern dan sisanya sebanyak 7% sudah menggunakan cara modern, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa koperasi yang sudah melakukan modernisasi.

Secara keseluruhan untuk Pilar “*Usaha Koperasi*” sebagian besar koperasi masih menggunakan cara-cara tradisional padahal tantangan dunia usaha dewasa ini mengharuskan koperasi untuk segera melakukan modernisasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada anggota secara optimal.

b. Pilar Keuangan koperasi

Pilar “Keuangan Koperasi” terdiri dari indikator-indikator Standar Akuntansi dan Laporan Keuangan *On Line*. Dari hasil pengamatan terhadap indikator-indikator Pilar “Keuangan Koperasi” diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.

Tabel 4.
Indikator Pilar Keuangan Koperasi

No.	NAMA KOPERASI	Standar Akuntansi			Laporan Keuangan OL		
		T	SM	M	T	SM	M
1	Koperasi Arta Prima-Banten	X			X		
2	Koperasi Cipta Jaya Abadi-Banten	X			X		
3	Koperasi Tagana Mandiri Sejahtera-Banten	X			X		
4	Koperasi konsumen mandala sejahtera-Banten	X			X		
5	Koperasi sehat sejahtera-Banten	X			X		
6	Koperasi Serba Usaha Sepakat-Banten	X			X		
7	Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara		X			X	
8	Koperasi Peternak Bandung Selatan		X			X	
9	KSU Tandang Sari		X		X		
10	Koperasi Samitra Garut	X			X		
11	Koperasi Konsumen Peternak Mekar Jaya Garut		X		X		
12	Koperasi Swadaya Mandiri Tasikmalaya		X		X		
13	Koperasi Pedagang Susu Segar Assalaam-Surakarta	X			X		
14	Koperasi Produsen Sumber Agung Trajan-Surakarta	X			X		
15	KSU Mandiri Sukses-Sukoharjo		X		X		
16	Koperasi Rasita Berkat Mulia-Semarang	X			X		
17	Koperasi Berkah Utama-Semarang		X		X		
18	Koperasi Sentosa Makmur-Semarang		X		X		
19	Koperasi BTM Kota Gede-Jogjakarta		X		X		
20	Koperasi Karya Bakti-Jogjakarta		X		X		
21	Koperasi Gunung Ketur-Jogjakarta		X		X		
22	Koperasi Agung Mentari-Jogjakarta	X			X		
23	KUD Surejo-Jogjakarta	X			X		
24	KSU Melati-Jogjakarta		X		X		
25	KSU Dana Mandiri-Sidoarjo		X			X	
26	Koperasi Bina Sejahtera-Pacitan		X			X	
27	KUD Karya Sejahtera-Pacitan	X			X		
28	Kopwan Margo Mulyo-surabaya	X			X		
29	Koperasi Pertanian Ngudi Luhur-Pacitan		X		X		
30	KSU Sari Kencana-Pacitan		X		X		
Total		14	16		26	4	
%		47	53		87	13	

Keterangan :

T = Tradisional

SM = Semi Modern

M = Modern

Dari tabel tersebut koperasi-koperasi masih menggunakan cara-cara tradisional, terlihat bahwa untuk indikator “Standar Akuntansi” sebanyak 47% koperasi masih menggunakan cara-cara tradisional dan 53% sudah mulai menggunakan cara-cara semi modern, hal ini mengindikasikan bahwa Pilar Keuangan koperasi sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk indikator Standar Akuntansi walaupun masih sederhana.

Untuk indikator “Laporan Keuangan *On Line*” sebanyak 87% masih menggunakan cara-cara tradisional dan sebanyak 3% menggunakan cara semi modern, hal ini mengindikasikan bahwa sudah ada beberapa koperasi yang memanfaatkan teknologi untuk indikator “Laporan Keuangan *On Line*”.

Secara keseluruhan Pilar Keuangan menunjukkan bahwa cukup banyak koperasi yang sudah melakukan modernisasi walaupun masih dengan menggunakan teknologi yang sederhana.

Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Pilar Kelembagaan Koperasi masih menggunakan cara-cara tradisional, dari tiga indikator yang dianalisis semua menunjukkan bahwa untuk pilar ini belum terjadi modernisasi
2. Pilar Usaha Koperasi sudah menunjukkan penggunaan cara-cara modern, hal ini terlihat dari beberapa indikator yang dianalisis menunjukkan telah terjadi modernisasi terutama pada indikator telah memiliki *off taker* dan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Pilar Keuangan Koperasi merupakan pilar yang secara dominan terlihat telah terjadi modernisasi, hal ini sejalan dengan gencarnya program-program pemerintah untuk penguatan di Pilar Keuangan melalui Bimtek yang secara masive rutin dilakukan.

Saran

1. Modernisasi harus dilakukan pada Pilar Kelembagaan dan Pilar Usaha terutama pada beberapa indikator.
2. Pilar Keuangan walaupun terlihat sudah terjadi modernisasi namun perlu dilakukan pengintegrasian secara sistem dengan pilar-pilar lain sehingga merupakan satu kesatuan sistem
3. Modernisasi yang harus dilakukan adalah sebuah proses yang dapat menghasilkan sebuah Model Koperasi Modern

Data Penulis



Dr. Heri Nugraha, SE., M.Si.: lahir di Bandung 10 Oktober 1965, saat ini sebagai Dosen di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) dan menjabat sebagai Direktur Kerjasama Ikopin, pendidikan terakhir S-3 Bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Unpad.

Daftar Pustaka

Hadiprodjo, S. R. 1992. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: BPFE.

Hanel, Alfred, 2005. *Organisasi Koperasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Hendar dan Kusnadi, 1999. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta : Lembaga Penerbit

Republik Indonesia, 2012. *Undang-undang Perkoperasian RI No. 25 Tahun 1992*. Jakarta:
Kementrian Koperasi dan UKM

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta